

**KETIMPANGAN SOSIAL DI INDONESIA SEBAGAI TANTANGAN  
NYATA DALAM MEWUJUDKAN NILAI KEADILAN SOSIAL  
BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA BERDASARKAN SILA  
KELIMA PANCASILA**

**Acha Nurafifah<sup>1</sup>, Dika Amanda Mega Permata<sup>2</sup>, Halimatussa'diyah<sup>3</sup>, Fahmatul  
Aulia<sup>4</sup>, Alia Lestari<sup>5</sup>, Husnul Vatimah Alazwa<sup>6</sup>**

Program Studi Arsitektur, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Teknik,  
Universitas Bandar Lampung

Jl. Z.A Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar  
Lampung E-mail: [chanurafifah@gmail.com](mailto:chanurafifah@gmail.com)<sup>1</sup>, [permata25@gmail.com](mailto:permata25@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[diyah100112008@gmail.com](mailto:diyah100112008@gmail.com)<sup>3</sup>, [fahmaaulia995@gmail.com](mailto:fahmaaulia995@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[alialstriii@gmail.com](mailto:alialstriii@gmail.com)<sup>5</sup>, [Husnulvatimah29@gmail.com](mailto:Husnulvatimah29@gmail.com)<sup>6</sup>

**Abstract:** *The fifth principle of Pancasila, "Social Justice for All Indonesian People," emphasizes the importance of equitable welfare and equal opportunities for all citizens. However, social inequality remains a serious issue that hinders the realization of this ideal in Indonesia. Inequality appears in various sectors, including the economy, education, and access to resources. This article aims to analyze the causes and impacts of social inequality on the implementation of social justice values in Indonesia. The method used is descriptive qualitative, based on literature review and current social phenomena. The findings show that inequality is caused by uneven development, educational disparities, and economic policies that are not yet fully inclusive. Therefore, collaborative efforts between the government and society are needed to achieve social justice through equitable development and community-based economic empowerment.*

**Keywords:** Social inequality, social justice, Pancasila, development.

**Abstrak:** *Sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," mengandung makna penting mengenai pemerataan kesejahteraan dan kesempatan bagi seluruh warga negara. Namun, kondisi ketimpangan sosial di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang menghambat terwujudnya nilai tersebut. Ketimpangan terjadi dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, dan akses terhadap sumber daya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penyebab dan dampak ketimpangan sosial terhadap implementasi nilai keadilan sosial di Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif berdasarkan kajian literatur dan fenomena sosial yang terjadi. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketimpangan disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata, kesenjangan pendidikan, serta kebijakan ekonomi yang belum sepenuhnya inklusif. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan keadilan sosial melalui pemerataan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi rakyat.*

**Kata kunci:** Ketimpangan sosial, keadilan sosial, Pancasila, pembangunan.

## **PENDAHULUAN**

KBBI mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkait arti Pancasila bagi bangsa Indonesia sebagai dasar negara adalah Pancasila merupakan dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, arti Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dimaknai dengan dijadikannya

**KETIMPANGAN SOSIAL DI INDONESIA SEBAGAI TANTANGAN NYATA DALAM  
MEWUJUDKAN NILAI KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA  
BERDASARKAN SILA KELIMA PANCASILA**

Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan.<sup>1</sup> Lebih lanjut, terkait kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, diterangkan M. Syamsudin dkk. dalam Pendidikan Pancasila: Menempatkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan, kedudukan atau fungsi Pancasila sebagai dasar negara dapat ditinjau dari berbagai aspek yakni aspek historis, kultural, yuridis, dan filosofis.<sup>2</sup>

Secara historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia Merdeka. Dalam prosesnya, segala perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini digali dan didasarkan dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia dan dituangkan menjadi kesatuan sebagai pandangan hidup bangsa. Secara kultural, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebuah hasil budaya bangsa. Oleh karenanya, Pancasila haruslah diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan. Jika tidak diwariskan, negara dan bangsa akan kehilangan kultur yang penting. Penting untuk diingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur bangsanya.

Secara yuridis Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.<sup>3</sup> Sehubungan dengan itu, Pancasila memiliki kekuatan yang mengikat. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila dinyatakan tidak berlaku dan harus dicabut. Terakhir, secara filosofis nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Tatanan nilai ini tidak lain merupakan ajaran tentang berbagai bidang kehidupan yang dipengaruhi oleh potensi, kondisi bangsa, alam, dan cita-cita masyarakat. Lebih lanjut, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila diakui sebagai filsafat hidup yang berkembang dalam sosial budaya Indonesia.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu dari lima sila dalam Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Dalam sila kelima tersebut, mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil.<sup>4</sup> Sila ini menegaskan pentingnya terciptanya keadilan sosial bagi setiap individu di Indonesia, tanpa memandang perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, agama, suku, atau budaya.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketimpangan sosial adalah suatu keadaan yang terjadi karena adanya kesenjangan atau ketidaksetaraan dalam akses untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia<sup>5</sup>. Sumber daya ini mencakup kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan tempat tinggal.

Jika kesenjangan itu terjadi maka akan menyebabkan berbagai masalah seperti terbatasnya akses terhadap layanan publik, meningkatnya kemiskinan, diskriminasi, hingga perubahan kualitas hidup. Terdapat tujuh faktor penyebab ketimpangan sosial di masyarakat, yaitu kondisi

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Pancasila", diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<sup>2</sup> M. Syamsudin, dkk., *Pendidikan Pancasila: Menempatkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan* (Yogyakarta: Penerbit, Tahun).

<sup>3</sup> R. A. W. Yovita, "Arti Pancasila sebagai Dasar Negara", *Hukumonline*, 15 Agustus 2022, diakses pada 15 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/arti-pancasila-sebagai-dasar-negara-lt61f23142a7e13/>

<sup>4</sup> Fakultas Humaniora UMSU, "Peran Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", diakses pada 15 Oktober 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/peran-sila-keadilan-sosial-bagi-seluruh-rakyat-indonesia/>

<sup>5</sup> Brain Academy, "Ketimpangan Sosial", diakses pada 15 Oktober 2023, <https://www.brainacademy.id/blog/ketimpangan-sosial>

***KETIMPANGAN SOSIAL DI INDONESIA SEBAGAI TANTANGAN NYATA DALAM  
MEWUJUDKAN NILAI KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA  
BERDASARKAN SILA KELIMA PANCASILA***

demografi, kondisi pendidikan, kondisi kesehatan, kemiskinan, perbedaan status sosial, kondisi ekonomi, dan kurangnya lapangan kerja. Berikut penjelasan dari masing-masing faktor tersebut:

Kondisi demografi memiliki hubungan dengan masalah kependudukan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Bayangkan jika kamu tinggal di daerah yang penduduknya sangat padat. Pastinya, akses ke sekolah, pekerjaan, dan fasilitas umum jadi terbatas. Di tempat dengan jumlah penduduk yang padat dan kondisi usia yang beragam, sumber daya seperti pendidikan dan pekerjaan sering tidak cukup untuk semua orang, dan hal tersebut menyebabkan ketimpangan sosial.

Misalnya, dua teman bersekolah di tempat berbeda, satu di sekolah dengan fasilitas lengkap dan guru berkualitas, dan satunya di sekolah dengan fasilitas kurang. Teman dengan pendidikan lebih baik tentu punya peluang lebih besar untuk meningkatkan statusnya. Ketidaksetaraan akses pendidikan inilah yang membuat ketimpangan sosial di masyarakat. Jika kamu tidak bisa pergi ke dokter atau rumah sakit karena biayanya mahal dan jaraknya jauh, tentu saja kalian akan lebih sulit untuk sembuh. Akses ke fasilitas kesehatan yang tidak merata dapat mempengaruhi kualitas SDM dan perkembangan wilayah tersebut.

Orang yang hidup dalam kemiskinan seringkali mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Mereka juga tidak punya banyak kesempatan untuk memperbaiki kondisi hidupnya, dan akhirnya memperluas ketimpangan sosial dengan mereka yang punya lebih banyak uang dan kesempatan. Status sosial itu seperti “label” di masyarakat. Misalnya, ada yang dipandang lebih tinggi, karena pekerjaan, pendidikannya, atau latar belakang keluarganya. Orang-orang dengan status sosial lebih tinggi sering kali memiliki akses yang lebih baik ke berbagai kesempatan, sementara yang di bawah sering tertinggal.

Ada yang bilang “uang bikin dunia berputar”, artinya orang yang punya banyak uang bisa dengan mudah mengakses pendidikan, kesehatan, dan peluang bisnis yang menguntungkan. Tapi mereka yang hidup dengan penghasilan minimal sering sulit memperbaiki keadaan. Ketimpangan ekonomi ini adalah salah satu penyebab utama ketidakadilan di masyarakat. Kalau lapangan kerja terbatas, tidak semua orang bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Bayangkan banyak orang mencari kerja tetapi hanya sedikit yang tersedia, penurunan otomatis meningkat dan membuat banyak orang sulit mendapatkan penghasilan. Hal ini membuat ketimpangan antara yang bekerja dan tidak bekerja semakin nyata.

Mengandung makna bahwa setiap manusia memiliki hak dalam keadilan, tidak bisa dipaksa ataupun memaksa kehendak pada orang lain, serta menumbuhkan rasa kekeluargaan. Civitas akademika umumnya berperan pada nilai-nilai sila ke-5 ini yaitu harus tetap terus menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, menghargai pendapat orang lain, dan bersikap adil dalam mengambil keputusan. Tak heran, dimasing-masing bangku pendidikan mewajibkan mengajarkan nilai-nilai pancasila yang diajarkan dalam mata kuliah/pelajaran pendidikan kewarganegaraan.<sup>6</sup> Hal ini tak lain dilakukan untuk menjadikan pancasila sebagai pedoman bagi masyarakat terutama generasi milenial, baik dalam berkehidupan dimasa sekarang maupun dimasa mendatang.

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memuat prinsip-prinsip yang relevan dalam menghadapi ketimpangan sosial dan ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut, seperti keadilan

---

<sup>6</sup> Fakultas Teknik Universitas Jember, "Peran Kita dalam Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila", diakses pada 15 Oktober 2023, <https://teknik.unej.ac.id/peran-kita-dalam-menerapkan-nilai-nilai-pancasila/>

***KETIMPANGAN SOSIAL DI INDONESIA SEBAGAI TANTANGAN NYATA DALAM  
MEWUJUDKAN NILAI KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA  
BERDASARKAN SILA KELIMA PANCASILA***

sosial, persatuan, kerakyatan, dan kesejahteraan, digunakan sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan publik yang bertujuan mengurangi kesenjangan. Sebagai contoh, upaya pemerintah untuk mencapai kesetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar, diimplementasikan melalui program-program bantuan sosial yang ditargetkan kepada masyarakat terpinggirkan dan rentan. Berbagai kebijakan publik juga telah diterapkan guna mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia, seperti program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang bertujuan untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang sama bagi seluruh anak Indonesia, dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi<sup>7</sup>. Tujuan dari kebijakan-kebijakan ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, adanya mobilitas sosial dapat berpengaruh besar dalam memperkecil ketimpangan di Indonesia. Pergerakan individu dan kelompok antara posisi sosial ekonomi yang berbeda, dengan mobilitas sosial ini kita dapat mendistribusikan kepadatan penduduk secara merata, sehingga sistem hirarki atau stratifikasi sosial dapat dipatahkan. Adanya pergerakan mobilitas sosial ini tanpa kita sadari bisa memeratakan ekonomi di Indonesia. Dalam membangun masyarakat yang adil dan merata, penting untuk terus memperkuat implementasi kebijakan, melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan nilai-nilai Pancasila terutama pada poin kelima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena ketimpangan sosial di Indonesia secara mendalam berdasarkan kajian literatur dan data sekunder. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman makna, nilai, serta penerapan sila kelima Pancasila dalam konteks kehidupan sosial masyarakat.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan resmi pemerintah, serta sumber daring yang relevan. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ketimpangan sosial, faktor penyebabnya, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama, yaitu bentuk ketimpangan, penyebab, dampak, dan solusi dalam perspektif nilai keadilan sosial Pancasila. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara ketimpangan sosial dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor-Faktor Internal Yang Menyebabkan Terjadinya Ketimpangan Sosial Di Indonesia**

Ketimpangan sosial merupakan salah satu permasalahan sosial yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Satu kelompok hidup bergelimang kemewahan sementara sisi lain ada kelompok yang susah payah untuk memenuhi kebutuhan pokok. Mengutip dari buku Kesehatan

<sup>7</sup> BEM FISIPOL Universitas Negeri Surabaya, "Ketimpangan Sosial dan Ekonomi: Meninjau Kebijakan Publik dalam Upaya Mengurangi Kesenjangan Berdasarkan Pancasila", diakses pada 15 Oktober 2023, <https://bem.fisipol.unesa.ac.id/post/ketimpangan-sosial-dan-ekonomi-meninjau-kebijakan-publik-dalam-upaya-mengurangi-kesenjangan-berdasarkan-pancasila>

**KETIMPANGAN SOSIAL DI INDONESIA SEBAGAI TANTANGAN NYATA DALAM  
MEWUJUDKAN NILAI KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA  
BERDASARKAN SILA KELIMA PANCASILA**

Reproduksi Medis Sosial Psikologi oleh Anita Lontaan dkk. Ketimpangan sosial adalah ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Ketimpangan juga menunjukkan situasi di tengah masyarakat menunjukkan adanya ketidakmerataan dan ketidakadilan.<sup>8</sup>

Tantangan Bagi sila Kelima yaitu, Tantangan masyarakat yang berkaitan dengan nilai dalam sila kelima ini adalah muncul paham kapitalisme, kapitalisme, hedonisme, dan individualism. Padahal sila kelima ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan sebagian masyarakat terkesan memaksakan diri untuk ikut dalam hidup yang serba mewah tersebut sehingga menimbulkan masalah baru yakni korupsi. Dengan demikian, kejahatan korupsi telah mengakibatkan kehancuran perekonomian bangsa yang membuat menurunnya stabilitas sosial dan juga menderitanya. Sebagian masyarakat menengah kebawah,

Nilai keadilan merupakan nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidak berpihakkan, keseimbangan, serta pemerataan yang terjadi pada suatu hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan citacita bangsa Indonesia. Mewujudkan keadaan masyarakat yang dapat bersatu secara organik, dimana setiap anggotanya dapat mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan aslinya. Segala usaha diarahkan kepada seluruh potensi rakyat, memupuk perwatakan dan meningkatkan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan dapat tercapai secara merata. Sila kelima:

Makna Umum Sila Kelima Sila kelima dari Pancasila mengandung makna bahwanegara Indonesia bertekad mewujudkan keadilan dalam seluruh spek kehidupan bersama, baik dalam bidang ekonomi, hukum, sosial, politik, budaya, maupun lingkungan. Tujuan dariskeadilan ini aclalah untuk menjamin kesejahteraan yang merata, melindungi hak-hak rakyat, serta menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warga negara. Sila ini menegaskan bahwa negara bukan hanya melindungi kebebasan individu, tetapi juga aktif menciptakan tatanan kehidupan sosial yang adil, manusiawi, dan berkeadaban, dengan memperhatikan kelompok yang lemah dan termarjinalkan.

Secara filosofis, keadilan sosial dalam Pancasila berpijak pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan ajaran agama yang menekankan tanggung jawab bersama terhadap sesama manusia, keseimbangan antara individu dan masyarakat, gotong royong sebagai ekspresi keacilan fungsional, serta anti-eksploitasi dan anti-ketimpangan dalam bentuk apapun. Konsep keadilan sosial dalam Pancasila tidak identik dengan liberalisme atau komunisme, melainkan berada di tengah: mengakui hak milik pribadi, tetapi membatasi penggunaannya demi kepentingan umum. Menurut Franz Magnis-Suseno, keadilan sosial dalam Pancasila adalah jalan tengah antara individualisme Barat dan kolektivisme Timur, yang menempatkan kesejahteraan bersama sebagai prioritas moral.

Sila kelima bukan hanya berbicara tentang keadilan antarindividu, tetapi menyarankan struktur sosial dan kebijakan negara. Ini berarti negara harus mengatur sistem ekonomi yang adil, menghapuskan struktur ketimpangan, menjamin akses setara terhadap sumber daya, serta membangun sistem hukum yang melindungi semua warga. Makna paling hakiki dari sila kelima Adalah penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Negara wajib memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, Tidak ada warga negara

---

<sup>8</sup> Anita Lontaan, dkk., *Kesehatan Reproduksi Medis Sosial Psikologi*.

yang dibiarkan hidup dalam kemiskinan, ketertindasan, atau keterasingan. Dan keadilan sosial menjelma dalam bentuk kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan, seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan daerah tertinggal.<sup>9</sup>

### **Pengertian Ketimpangan Sosial Menurut Para Ahli**

Mengutip dari buku Sosiologi: Aktif dan Kreatif Belajar Ilmu Sosiologi oleh Mir'atul Farkhah, beberapa ahli juga turut memberikan definisi terkait ketimpangan sosial.<sup>10</sup>

1. Jennie Naidoo dan Jane Wills, ketimpangan sosial adalah perbedaan dalam pemasukan (income) sumber daya (resource), kekuasaan atau power dan status di dalam masyarakat.
2. Budi Winarno mengatakan bahwa ketimpangan sosial adalah kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga.
3. Soerjono Soekanto menyebut ketimpangan sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur budaya atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial.
4. Jonathan Houghton, menurutnya ketimpangan sosial adalah sebagai bentuk ketidakadilan yang merupakan dampak dari proses pembangunan.
5. Roichatul Aswidah berpendapat, bahwa ketimpangan sosial adalah sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi.
6. William Ogburn berpendapat, bahwa ketimpangan sosial adalah sebagai perubahan sosial yang melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat yang saling berhubungan antara satu dan lainnya.
7. Andrinof A. Chaniago juga turut mendefinisikan ketimpangan sosial sebagai buah dari pembangunan yang berfokus pada ekonomi dan melupakan aspek sosial.

Dengan globalisasi terus meluas di belahan dunia ini, terdapat berbagai contoh ketimpangan sosial di bidang pendidikan yang hadir dalam dinamika sosial masyarakat. R. Khandker dalam buku *Top One Bedah Kisi-kisi Terlengkap UTBK SBMPTN SOSHUM 2020*, menyatakan ketimpangan sosial adalah berbagai ketidakadilan yang muncul dalam proses pembangunan dalam masyarakat.<sup>11</sup> Dalam era globalisasi saat ini, pendidikan telah menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sosial dan ekonomi. Namun, masih ada sejumlah ketimpangan sosial yang signifikan di bidang pendidikan. Berikut adalah tujuh contoh ketimpangan sosial di bidang pendidikan di era globalisasi.<sup>12</sup>

Kesenjangan sosial sering disebabkan oleh perbedaan status sosial, ekonomi, dan budaya. Aspek-aspek utama dari ketidaksetaraan ini meliputi kesenjangan ekonomi, distribusi pemasukan, dan perbedaan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, perumahan, dan layanan keuangan. kesenjangan sosial di tempat kerja menjadi perhatian serius dalam era kerja modern.<sup>13</sup> Tantangan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk kesenjangan antar generasi, kesenjangan antar jenis pekerjaan, kesenjangan gaji, dan diskriminasi terhadap perempuan.

Untuk mengatasi isu ini, perlu dilakukan upaya nyata dengan memahami dampak serta akar permasalahan ini agar langkah-langkah yang diambil dapat efektif dan berkelanjutan. Sebagai

---

<sup>9</sup> Zainudin Hasan, *Pancasila dan Kewarganegaraan* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 89.

<sup>10</sup> Mir'atul Farkhah, *Sosiologi: Aktif dan Kreatif Belajar Ilmu Sosiologi*.

<sup>11</sup> R. Khandker, *Top One Bedah Kisi-kisi Terlengkap UTBK SBMPTN SOSHUM 2020*.

<sup>12</sup> Kumparan.com, "7 Contoh Ketimpangan Sosial di Bidang Pendidikan di Era Globalisasi", diakses pada 15 Oktober 2023, <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/7-contoh-ketimpangan-sosial-di-bidang-pendidikan-di-era-globalisasi-20PeyCIetN>

<sup>13</sup> MyRobin.id, "Kesenjangan Sosial di Tempat Kerja", diakses pada 15 Oktober 2023, <https://myrobin.id/pojok-hrd/kesenjangan-sosial-di-tempat-kerja/>

***KETIMPANGAN SOSIAL DI INDONESIA SEBAGAI TANTANGAN NYATA DALAM  
MEWUJUDKAN NILAI KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA  
BERDASARKAN SILA KELIMA PANCASILA***

HR, tentunya Anda juga perlu untuk mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan masalah kesenjangan sosial di perusahaan. Kesenjangan sosial di dunia kerja menjadi tantangan yang memerlukan perhatian mendalam untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, inklusif, dan berdaya saing. Sebuah perusahaan akan lebih kondusif jika kesenjangan sosial yang terjadi di lingkungannya dapat diselesaikan dengan baik. Berikut adalah beberapa contoh dari kesenjangan sosial yang terjadi di tempat kerja:

1. Kesenjangan Antar Generasi

Perbedaan pandangan, nilai, dan gaya kerja antar generasi dapat menjadi sumber ketidaksepadaman dan konflik di tempat kerja. Generasi yang lebih muda mungkin memiliki preferensi kerja yang berbeda dengan generasi yang lebih tua.

Tidak hanya preferensi kerja, kadang karyawan menemukan kesulitan komunikasi dengan generasi yang berbeda. Generasi yang lebih muda biasanya akan berkomunikasi dengan lebih santai, berbeda dengan generasi yang lebih tua dengan pembawaan yang dewasa. Perbedaan ini tentunya bisa menjadi sebuah konflik di tempat kerja.

2. Kesenjangan Antar Jenis Pekerjaan

Perbedaan jenis pekerjaan, baik dalam hal tanggung jawab maupun tingkat keterampilan, seringkali menciptakan kesenjangan sosial. Kesulitan ini dapat mencakup ketidaksetaraan dalam gaji, fasilitas, dan kesejahteraan karyawan.

3. Kesenjangan Gaji

Kesenjangan gaji yang signifikan antara karyawan level manajemen dan staf merupakan permasalahan yang sering kali mengakibatkan ketidakpuasan di antara anggota tim. Terlebih jika sesama staf pada level yang sama memiliki gaji yang berbeda. Kesenjangan ini tentunya bisa menciptakan konflik dalam tim.

4. Kesenjangan Kesempatan

Kesenjangan kesempatan dalam hal karier, pendapatan, dan partisipasi sosial menciptakan ketidaksetaraan yang mendalam. Tidak hanya kesempatan dalam menjalankan kewajiban dan tugas, kesenjangan kesempatan juga dapat berupa perbedaan kesempatan dalam mengembangkan diri di lingkungan kerja.

5. Kesenjangan Antar Orang Kaya dan Miskin

Perbedaan ekonomi yang mencolok di antara karyawan dapat menciptakan kesenjangan sosial yang signifikan. Tidak hanya menjadi kesenjangan di masyarakat secara umum, kesenjangan antara orang kaya dan miskin dapat terjadi di lingkungan kerja.

6. Kesenjangan Terkait Fasilitas Umum

Perbedaan akses terhadap fasilitas umum seperti pendidikan, perumahan, dan layanan keuangan dapat memperdalam kesenjangan sosial di tempat kerja. Kesenjangan ini tentunya tidak hanya terjadi di lingkungan kerja. Dengan kacamata yang lebih luas, kesenjangan terkait fasilitas umum terjadi di masyarakat. Di lingkungan kerja, kesenjangan terkait fasilitas umum ini dapat dilihat dari beragam pendidikan para pekerja yang ada dan perbedaan tempat tinggal. Dengan menyelami contoh-contoh kasus tersebut, perusahaan dapat merancang lingkungan kerja yang lebih inklusif, adil, dan berdaya saing. Upaya nyata untuk membangun pemahaman, memberikan gaji dan fasilitas yang adil, serta menghindari diskriminasi, akan membawa perubahan positif dalam budaya organisasi.

**Faktor-Faktor Eksternal Yang Menyebabkan Terjadinya Ketimpangan Sosial Di Indonesia**

Faktor ancaman di bidang ekonomi secara eksternal adalah faktor yang mengancam perekonomian sebuah negara dari luar (negara lain). Di antaranya dapat berbentuk kinerja

**KETIMPANGAN SOSIAL DI INDONESIA SEBAGAI TANTANGAN NYATA DALAM  
MEWUJUDKAN NILAI KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA  
BERDASARKAN SILA KELIMA PANCASILA**

ekonomi yang buruk, daya saing sumber daya manusia (SDM) yang rendah, ketidaksiapan menghadapi globalisasi, dan tingkat ketergantungan terhadap pihak asing.<sup>14</sup>

1. Kinerja ekonomi yang buruk

Negara tidak dapat berdiri sendiri, perlu adanya kerja sama antar negara dalam kegiatan perekonomian. Peningkatan pendapatan serta keberlangsungan rumah tangganya negara menjadi alasan terjadinya kerja sama.

Setiap negara diharuskan memiliki sikap yang baik, mampu melihat pasar, memiliki utang yang rendah serta bersaing secara sehat agar negara lain mau menjalin kerja sama. Indikator kinerja ekonomi yang buruk akan menurunkan kepercayaan negara lain untuk bekerja sama dalam perdagangan maupun ekonomi lainnya.

2. Daya saing SDM rendah

Ancaman di bidang ekonomi eksternal ini menyebabkan banyaknya pengangguran. Kemampuan tenaga kerja dari SDM lokal yang terbatas membuatnya kalah bersaing dengan tenaga kerja luar negeri. Rendahnya daya saing dapat menimbulkan merosotnya perekonomian. Akibatnya, masyarakat memiliki kontribusi yang kurang dalam bidang ekonomi Negara karena tidak bekerja, atau bekerja dengan level jabatan yang rendah. Solusi dari masalah ini adalah dengan meningkatkan kualitas SDM dengan skill mumpuni, dengan berinovasi dan mengeksplorasi kreativitas sehingga dapat bersaing di kancah internasional.

3. Tidak siap menghadapi globalisasi

Globalisasi merupakan era kemajuan zaman yang melibatkan teknologi dalam kehidupan sosial dan ekonomi dunia. Negara yang tidak siap menghadapinya dipastikan akan jauh tertinggal dalam bidang ekonomi. Sebab teknologi yang maju akan mempermudah dan mempercepat kegiatan ekonomi maupun transaksi ekonomi. Untuk siap menghadapi globalisasi, dibutuhkan pelatihan penggunaan fasilitas teknologi di masyarakat seperti penggunaan gadget, internet, serta mesin yang canggih dan modern. Selain itu, para investor akan dengan mudah memonopoli perekonomian suatu negara yang berujung pada terancamnya kedaulatan.

4. Tingkat ketergantungan terhadap pihak asing

Saling bekerja sama antar negara merupakan hal yang wajar. Pastikan tidak terlalu bergantung dengan negara lain. Karena ketika ekonomi global merosot, perekonomian juga akan merosot. Ekonomi negara berkembang tentu akan cepat terimbas pada gejolak ekonomi dari negara maju yang berpengaruh. Indonesia sendiri masih bergantung pada Negara Adidaya Amerika Serikat dalam bidang ekonomi. Misalnya, inflasi yang dialami Amerika Serikat berpengaruh pada nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika. Sedangkan Negara yang mandiri secara ekonomi dengan angka produksi barang dan daya beli yang tinggi seperti Tiongkok tidak akan terpengaruh oleh Negara lain.

**Faktor Penyebab Kesenjangan Sosial**

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial. Berikut adalah faktor-faktor yang perlu kamu pahami.<sup>15</sup>

1. Perbedaan Sumber Daya Alam

---

<sup>14</sup> Kumparan.com, "Ancaman Eksternal dalam Bidang Ekonomi Dapat Berbentuk Buruknya Kinerja Ekonomi", diakses pada 15 Oktober 2023, <https://kumparan.com/berita-bisnis/ancaman-eksternal-dalam-bidang-ekonomi-dapat-berbentuk-buruknya-kinerja-ekonomi-1wj0M9hzXWT/full>

<sup>15</sup> Gramedia.com, "Kesenjangan Sosial", diakses pada 15 Oktober 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/kesenjangan-sosial/>

***KETIMPANGAN SOSIAL DI INDONESIA SEBAGAI TANTANGAN NYATA DALAM  
MEWUJUDKAN NILAI KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA  
BERDASARKAN SILA KELIMA PANCASILA***

Salah satu faktor terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi adalah kekuatan sumber daya alam yang ada di daerah-daerah. Sebab, tingkat ekonomi suatu daerah dapat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alamnya. Tingkat ekonomi suatu masyarakat bisa meningkat apabila sumber daya alamnya dikelola dengan cara yang tepat.

2. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah dapat menjadi faktor penting terjadinya kesenjangan sosial. Sebab, dalam mengambil keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menciptakan kesenjangan di lapisan masyarakat. Misalnya, kesenjangan di bidang program transmigrasi. Dimana masyarakat pendatang akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan masyarakat asli daerah tersebut.

Hal ini terjadi karena kesempatan dan peluang yang tersedia lebih besar diberikan kepada warga transmigran. Oleh karena itu, kemudian tercipta kesenjangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat.

3. Pengaruh Globalisasi

Selain dapat dimanfaatkan untuk memajukan ekonomi bersama. Globalisasi juga bisa menciptakan adanya kesenjangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Kesenjangan tersebut muncul ketika sebagian masyarakat tidak mampu beradaptasi dengan adanya globalisasi. Sehingga mereka akan tertinggal dan tidak mendapatkan apa yang orang lain dapatkan. Buku Sosiologi kesenjangan

4. Kondisi Demografis

Kondisi demografi setiap daerah bisa dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan masyarakatnya, kesehatan, pendidikan, dan juga lapangan pekerjaan. Dengan begitu, tentu setiap daerah akan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Hal inilah yang nantinya akan menciptakan adanya kesenjangan sosial. Sebab, produktivitas kerja setiap anggota masyarakat di berbagai daerah tentu tidak sama.

5. Letak dan Kondisi Geografis

Kondisi ini umumnya akan mempengaruhi proses pembangunan di daerah tersebut. Umumnya, masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi, akan merasa kesulitan untuk membangun infrastruktur dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di dataran rendah.

## **KESIMPULAN**

Ketimpangan sosial di Indonesia merupakan tantangan serius dalam mewujudkan nilai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan sila kelima Pancasila. Secara empiris, ketimpangan ini terlihat nyata, kesenjangan pendidikan antarwilayah (Jakarta 11,5 tahun vs Papua Pegunungan 5,1 tahun), serta ketidakmerataan akses kesehatan antara kota dan desa. Ketimpangan ini disebabkan oleh faktor internal seperti kesenjangan pendidikan, kemiskinan, kondisi demografis, dan kurangnya lapangan kerja, serta faktor eksternal seperti globalisasi, daya saing SDM rendah, dan ketergantungan pada pihak asing. Meskipun pemerintah telah melaksanakan program seperti KIP dan JKN, implementasinya masih terhambat oleh ketidakmerataan pelaksanaan, korupsi, dan ketidakupayaan sasaran.

Untuk mewujudkan keadilan sosial yang sesungguhnya, diperlukan upaya komprehensif melalui kebijakan redistribusi pendapatan yang tepat sasaran, pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pengurangan kesenjangan gender, peningkatan mobilitas sosial, serta kolaborasi aktif antara pemerintah dan masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

***KETIMPANGAN SOSIAL DI INDONESIA SEBAGAI TANTANGAN NYATA DALAM  
MEWUJUDKAN NILAI KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA  
BERDASARKAN SILA KELIMA PANCASILA***

**DAFTAR PUSTAKA**

- Yovita, R. A. W. (2022, 15 Agustus). *Arti Pancasila sebagai Dasar Negara*. Hukumonline. Diakses pada 15 Oktober 2023, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/arti-pancasila-sebagai-dasar-negara-lt61f23142a7e13/> Sindonews Ekonomi & Bisnis. (2022, 2 Maret).
- Fakultas Humaniora UMSU. (n.d.). *Peran Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Diakses pada 15 Oktober 2023, dari <https://fahum.umsu.ac.id/peran-sila-keadilan-sosial-bagi-seluruh-rakyat-indonesia/>
- Brain Academy. (n.d.). *Ketimpangan Sosial*. Diakses pada 15 Oktober 2023, dari <https://www.brainacademy.id/blog/ketimpangan-sosial>
- Fakultas Teknik Universitas Jember. (n.d.). *Peran Kita dalam Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila*. Diakses pada 15 Oktober 2023, dari <https://teknik.unej.ac.id/peran-kita-dalam-menerapkan-nilai-nilai-pancasila/>
- Hasan, Zainudin. Pancasila dan Kewarganegaraan. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025.
- BEM FISIPOL Universitas Negeri Surabaya. (n.d.). *Ketimpangan Sosial dan Ekonomi: Meninjau Kebijakan Publik dalam Upaya Mengurangi Kesenjangan Berdasarkan Pancasila*. Diakses pada 15 Oktober 2023, dari <https://bem.fisipol.unesa.ac.id/post/ketimpangan-sosial-dan-ekonomi-meninjau-kebijakan-publik-dalam-upaya-mengurangi-kesenjangan-berdasarkan-pancasila>
- Detik.com. (2023, 15 Oktober). *Ketimpangan Sosial: Pengertian, Contoh, dan Faktor yang Memengaruhi*. Diakses pada 15 Oktober 2023, dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7012451/ketimpangan-sosial-pengertian-contoh-dan-faktor-yang-memengaruhi>
- Kumparan.com. (n.d.). *7 Contoh Ketimpangan Sosial di Bidang Pendidikan di Era Globalisasi*. Diakses pada 15 Oktober 2023, dari <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/7-contoh-ketimpangan-sosial-di-bidang-pendidikan-di-era-globalisasi-20PeyCIetN>
- MyRobin.id. (n.d.). *Kesenjangan Sosial di Tempat Kerja*. Diakses pada 15 Oktober 2023, dari <https://myrobin.id/pojok-hrd/kesenjangan-sosial-di-tempat-kerja/>
- Kumparan.com. (n.d.). *\*Ancaman Eksternal dalam Bidang Ekonomi Dapat Berbentuk Buruknya Kinerja Ekonomi\**. Diakses pada 15 Oktober 2023, dari <https://kumparan.com/berita-bisnis/ancaman-eksternal-dalam-bidang-ekonomi-dapat-berbentuk-buruknya-kinerja-ekonomi-1wj0M9hzXWT/full>
- Gramedia.com. (n.d.). *\*Kesenjangan Sosial\**. Diakses pada 15 Oktober 2023, dari <https://www.gramedia.com/literasi/kesenjangan-sosial/>
- Sari, N. P., & Setiawan, A. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. *\*Jurnal Ekonomi-Qu\**, 12(2), 123-140. Diakses dari <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Ekonomi-Qu/article/download/34720/15235>
- Juliana, B., Putri, E. R., & Karunia, N. (2023). Implementasi Sila Ke-5 Pancasila bagi Kesejahteraan Masyarakat. *Indigenous Knowledge*, 2(4). E-ISSN: 2746-3662.
- Steviani, D. S. 20218. Implementasi nilai kebangsaan bhinneka tunggal ika dalam peningkatan pelayanan publik. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 4(3)